

SINOPSIS

Skripsi ini berjudul **Implementasi desentralisasi pelayanan kesehatan (studi kasus mengenai pelaksanaan SPM bidang kesehatan di Puskesmas Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2006-2007)**. Pelaksanaan SPM bidang kesehatan cukup luas dan kompleks, oleh karena itu diperlukan batasan untuk mempersempit permasalahan sehingga terfokus pada permasalahan konkret di lapangan. Penulis berupaya untuk mendalami permasalahan di sekitar pelaksanaan SPM bidang kesehatan di Puskesmas I dan II Kecamatan Godean yang relatif dekat dengan domosili peneliti dan selalu banyak dikunjungi para pengguna jasa pelayanan kesehatan. Adanya berbagai keluhan terhadap pelayanan kesehatan di lapangan menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan SPM bidang kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya di Puskesmas I dan II Kecamatan Godean.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan SPM bidang kesehatan secara riil dalam pelayanan kepada masyarakat dan mengetahui makna di balik pelaksanaan SPM bidang kesehatan di Puskesmas I dan II Kecamatan Godean. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan unit analisisnya adalah masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas I dan II.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan kewenangan wajib SPM bidang kesehatan di Puskesmas I dan II Kecamatan Godean sudah berjalan dengan baik yang masih mengacu pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan indikator penilaian input, proses, output, outcome, benefit dan impact secara umum menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang lebih mengarah pada pengembangan SDM, hasil pencapaian kegiatan pelayanan, keuntungan materi serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Pelaksanaan SPM bidang kesehatan di Puskesmas I dan II Kecamatan Godean dipengaruhi oleh faktor komunikasi, pendanaan dan sarana fisik, sikap pelaksana (SDM) dan struktur birokrasi.

Penulis merekomendasikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tidak diukur dengan peningkatan tariff namun juga dibarengi dengan perbaikan kualitas pelayanan. Peningkatan fungsi manajemen dan efektivitas kinerja petugas kesehatan yang tinggi dapat menekan biaya operasional Puskesmas sehingga tidak perlu adanya kenaikan tariff pelayanan kesehatan